

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

2.1 Eskalasi Krisis Geopolitik Israel-Palestina dalam Perspektif Global

Konflik antara Israel dan Palestina bukan sekadar gesekan wilayah biasa, melainkan salah satu krisis kemanusiaan dan geopolitik paling kompleks yang mendominasi sejarah hukum internasional modern. Kajian berkala dari institusi pemantau internasional menegaskan bahwa determinan utama konflik ini berakar dari pertikaian berlapis atas kedaulatan tanah suci, pembagian batas wilayah resmi, perebutan status Yerusalem sebagai ibu kota, hak kepulangan jutaan pengungsi Palestina, serta hak menentukan nasib sendiri atau self-determination (Center for Preventive Action, 2024).

Eskalasi konflik memasuki fase paling destruktif pasca-serangan hebat pada akhir tahun 2023, yang direspons oleh pemerintah Israel melalui deklarasi perang total, pengepungan absolut, dan rangkaian agresi militer skala penuh ke Jalur Gaza (Al Jazeera, 2024). Meskipun Mahkamah Internasional atau *International Court of Justice* (ICJ) telah mengeluarkan putusan hukum yang memerintahkan Israel untuk mencegah tindakan genosida dan memastikan akses bantuan kemanusiaan, operasi militer di lapangan tetap berjalan secara masif tanpa memedulikan desakan gencatan senjata (Makarim, 2024). Memasuki periode tahun 2025 hingga pertengahan tahun 2026, krisis kemanusiaan global ini kian meluas dan melibatkan konfrontasi militer langsung dengan kekuatan regional lain di Timur Tengah, seperti ketegangan bersenjata yang melibatkan wilayah Lebanon dan serangan balasan drone dari Iran. Korban jiwa warga sipil Palestina di Jalur Gaza yang terus bertambah melahirkan gelombang solidaritas universal di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia, untuk mendorong munculnya berbagai bentuk partisipasi masyarakat sipil sebagai wujud komitmen moral kemanusiaan.

2.2 Dinamika Gerakan Boikot Produk Israel dan Solidaritas Masyarakat Sipil di Indonesia

Gerakan boikot terhadap produk yang dianggap memiliki afiliasi atau memberikan dukungan finansial kepada Israel merupakan objek utama dalam penelitian ini. Di Indonesia, tingkat dukungan terhadap gerakan konsumerisme politik (*political consumerism*) ini tercatat sangat tinggi. Berdasarkan data empiris dari survei Media Survei Nasional (Median) pada September 2025, sebanyak 80,2% masyarakat Indonesia secara tegas menyatakan persetujuan terhadap aksi boikot produk yang terafiliasi dengan Israel (Katadata, 2025). Alasan utama yang melatarbelakangi tingginya angka dukungan tersebut antara lain didorong oleh keinginan kolektif untuk memberikan sanksi ekonomi sebesar 20,9%, panggilan solidaritas kemanusiaan universal sebesar 18,8%, serta upaya aktif memutus dukungan sokongan finansial terhadap agresi militer Israel sebesar 17,2% (Katadata, 2025). Data statistik ini membuktikan bahwa gerakan boikot di Indonesia tidak bersifat spontan atau emosional sesaat, melainkan dilandasi oleh berbagai pertimbangan moral, emosional, dan rasional yang mengakar kuat di dalam struktur kesadaran masyarakat sipil.

Landasan normatif gerakan ini diperkuat secara signifikan oleh instrumen keagamaan melalui Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina. Fatwa tersebut menegaskan bahwa mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina hukumnya wajib, sementara mendukung agresi Israel termasuk melalui konsumsi produk yang terafiliasi secara langsung maupun tidak langsung hukumnya adalah haram. Keberadaan fatwa ini menjadi faktor diferensiasi sosiologis yang membedakan gerakan boikot di Indonesia dari gerakan serupa di negara-negara barat, karena mampu memberikan legitimasi moral berbasis teologis yang diakui secara luas oleh mayoritas masyarakat Muslim domestik. Produk komersial yang menjadi sasaran boikot mencakup spektrum yang sangat luas dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari sektor makanan dan minuman global seperti McDonald's dan Starbucks, korporasi multinasional seperti Nestlé dan Danone, hingga sektor perawatan dan

kecantikan di bawah naungan Unilever dan L'Oréal (Citra et al., 2025). Daftar produk ini bersifat dinamis dan terus diperbarui secara berkala berdasarkan informasi jaringan global Boycott, Divestment, Sanctions (BDS) yang diadaptasi oleh komunitas lokal.

Dinamika perlawanan makro kemasyarakatan ini tidak hanya berhenti di ruang digital, melainkan mewujud dalam mobilisasi massa nyata di tingkat daerah. Sebagai contoh nyata di wilayah Jawa Tengah, gerakan solidaritas makro yang dimotori oleh elemen keagamaan seperti Ahlulbait Indonesia secara konsisten mengkonsolidasikan ribuan massa sipil di Kota Semarang pada pertengahan Maret tahun 2026 (Ahlulbait Indonesia, 2026). Gerakan ini secara tegas mengeluarkan pernyataan sikap di depan publik untuk menolak segala bentuk kompromi ekonomi dan mengecam keikutsertaan dalam forum internasional seperti Board of Peace (BoP) yang dinilai mengabaikan hak-hak dasar kemerdekaan bangsa Palestina.



Gambar 2.1 Aksi Massa Lintas Elemen Masyarakat Sipil di Semarang

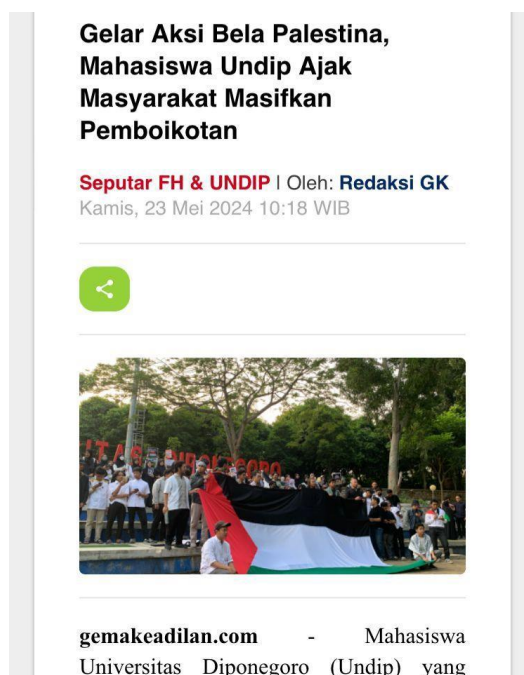
Visualisasi pada di atas memperlihatkan konsistensi pergerakan ribuan massa sipil luar kampus di Semarang yang turun ke jalanan protokol hingga depan Gedung DPRD (Ahlulbait Indonesia, 2026). Melalui kehadiran massa

yang masif dengan atribut bendera dan orasi kemanusiaan, aksi ini menjadi representasi dari tekanan sosiopolitik luar kampus yang memperluas gaung pemboikotan produk ekonomi pro-Israel ke ruang fisik publik di kalangan masyarakat konsumen perkotaan umum.

2.3 Aktivisme Kampanye Boikot dan Peran Media Sosial pada Mahasiswa Kota Semarang

Meskipun tingkat dukungan sosiologis terhadap gerakan boikot sangat tinggi di tingkat makro, tidak semua individu yang menyatakan setuju dengan gerakan ini kemudian benar-benar mengimplementasikan tindakan boikot secara konsisten dalam perilaku pembelian riil mereka sehari-hari. Kesenjangan (gap) antara aspek sikap dan tindakan aktual inilah yang menjadi persoalan krusial dan relevan untuk dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini (Yuan et al., 2023). Kondisi inilah yang melatarbelakangi pentingnya fokus penelitian untuk memahami faktor-faktor apa yang mampu mendorong kelompok akademis, khususnya mahasiswa, untuk mengubah sikap dukungan teoritis mereka menjadi sebuah tindakan boikot yang konsisten di kehidupan nyata. Kota Semarang dipilih sebagai lokus penelitian karena bertindak sebagai salah satu barometer pergerakan mahasiswa terbesar di Jawa Tengah dengan ekosistem sosial yang kaya, di mana mahasiswa dari berbagai latar belakang institusi perguruan tinggi negeri maupun swasta berinteraksi secara intensif satu sama lain.

Kelompok mahasiswa merupakan subjek yang sangat rentan sekaligus responsif terhadap arus informasi karena mereka memadukan tindakan boikot harian dengan aktivisme nyata di lingkungan akademik. Sebagai contoh, aliansi mahasiswa Undip *Students For Justice in Palestine* di lingkungan kampus Universitas Diponegoro.



Gambar 2.2 Aksi Solidaritas Damai Mahasiswa Undip Bela Palestina di Area Kampus Semarangan

Visualisasi pada gambar di atas menunjukkan bentuk advokasi kelompok mahasiswa Universitas Diponegoro yang menggelar aksi bentangan bendera raksasa sebagai simbol perlawanan akademik (Gema Keadilan, 2024). Melalui saluran interaksi interpersonal di dalam grup percakapan digital maupun komunitas kampus daring inilah, informasi mengenai daftar produk yang diboikot beredar secara konsisten di dalam lingkaran pertemanan sebaya (Sulaiman, 2024). Proses paparan informasi digital yang intensif ini menciptakan kesamaan pemahaman dan tekanan sosial kelompok acuan (*reference group*), yang pada akhirnya berpotensi memengaruhi keputusan mahasiswa Semarang untuk mengambil tindakan konsumsi yang etis serta memutus mata rantai pembelian produk terafiliasi agresi (Shah et al., 2022).